

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN
PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI DI PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

A'AT TAUFIK WAHYUDI

01031482124001

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN
PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI DI
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh:

Nama : A'at Taufik Wahyudi
NIM : 01031482124001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan:

Dosen Pembimbing

Tanggal: 28 November 2023



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN
PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI DI
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : A'at Taufik Wahyudi
NIM : 01031482124001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Eidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam uji komprehensif pada 04 Januari 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 13 Januari 2024

Pembimbing

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409631994032001

Penguji

Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak
NIP. 195808281988101001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
16/2024
WAW

Arista Haikiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A'at Taufik Wahyudi
NIM : 01031482124001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang kajian/konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN
PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PEMODERASI DI
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG”**

Pembimbing : Hj.Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 04 Januari 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak di sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia di cabut predikat kelulusan dan gelar ke sarjanaan.

Palembang, 15 Januari 2024



A'at Taufik Wahyudi

01031482124001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan berhasil (*Man jadda wajada*) dan Barang siapa yang bersabar maka dia yang akan beruntung (*Man shabara zhafira*). Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.

Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

(HR. Muslim)

Skripsi ini di persembahkan untuk

- **Kedua orang tua**
- **Kakak – kakakku**
- **Dosen pendidiku**
- **Teman – temanku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Demi terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang”, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala atas kemudahan, kelancaran, bantuan, kasih sayang, dan rahmat tak terhingga yang penulis terima. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Segala kesalahan atau kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini karena menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. atas segala usaha dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 04 Januari 2024



A'at Taufik Wahyudi
01031482124001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa bantuan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, nikmat, kelancaran dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua, Bapak Heruwanto dan Ibu Sumirah yang selalu memberikan doa yang teramat tulus yang tak henti hentinya, memberikan nasihat, selalu berkorban, menyayangi, membina, memberikan semangat dan selalu menjadi motivasi di dalam hidupku.
3. Kakak Rohadi Al Malik, S.Pd yang selalu mendukung, memberikan semangat dan membantu biaya selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Arista Hakikim S.E., M.Acc., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hj.Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, mengarahkan, mengoreksi serta memotivasi penulis selama menyelesaikan masa studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan selalu diberikan oleh Allah SWT.
8. Bapak Drs.H.Burhanuddin, M.Acc., Ak selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran.

9. Bapak DR. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu nya yang memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat dalam proses akademik.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas dalam mengajarkan dan memberikan ilmunya.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kelancaran proses administrasi selama perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi (S1 Asal D3) Angkatan tahun 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan pihak yang telah memberikan andil dalam terwujudnya skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dengan kekurangan yang meliputinya dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Palembang, 15 Januari 2024



A'at Taufik Wahyudi

01031482124001

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang

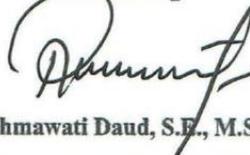
Oleh:

A'at Taufik Wahyudi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang. Populasi penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan keseluruhan jumlah populasi (Sampling jenuh atau Sensus) oleh karena itu sampel penelitian ini sebanyak 130 responden yang merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di 26 SKPD Pemerintah kota Palembang. Jenis data yang di gunakan adalah data primer. Teknik analisis yang di gunakan adalah *analisis regresi linier berganda* dan Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* menggunakan *IBM SPSS Statistics 29.0.1.0*. Hasil penelitian ini meneunjukkan secara parsial variabel akuntabilitas, dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen APBD, sedangkan variabel transparansi secara parsial berpengaruh terhadap variabel manajemen APBD. Secara simultan (Bersama-sama) variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap manajemen APBD. Dan dari hasil Uji *Moderated Regression Analysis*, variabel standar akuntansi pemerinta tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan APBD terhadap variabel manajemen / pengelolaan APBD. Akantetapi ada peningkatan persentase nilai *R Square*, dari 28,5% menjadi 40,4%. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Dapat sedikit memperkuat pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Manajemen / pengelolaan APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Manajemen APBD, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pembimbing



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP.197303171997031002

ABSTRACT

The Influence of Accountability, Transparency and Public Oversight on APBD Management Using Government Accounting Standards as Moderation in the Palembang City Government

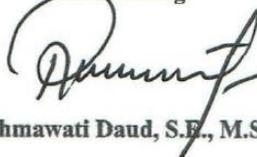
By:

A'at Taufik Wahyudi

This research aims to determine The Influence of Accountability, Transparency and Public Oversight on APBD Management Using Government Accounting Standards as Moderation in the Palembang City Government. The sample population for this research was taken using the entire population (saturated sampling or census), therefore the sample for this research was 130 respondents who were officials who used budgets/goods users in 26 SKPDs of the Palembang city government. The type of data used is primary data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) using IBM SPSS Statistics 29.0.1.0. The results of this research partially show that the variables of accountability and supervision have no influence on the APBD management variables, while the transparency variable partially influences the APBD management variables. Simultaneously (together) the variables of accountability, transparency and supervision influence APBD management. And from the results of the Moderated Regression Analysis Test, government accounting standard variables cannot moderated the influence of APBD accountability, transparency and supervision on APBD management/management variables. However, there was an increase in the percentage of the R Square value, from 28.5% to 40.4%. So it can be concluded that Government Accounting Standards can slightly strengthen the influence of Accountability, Transparency, Supervision on APBD Management.

Key Words: *Accountability, Transparency, Supervision, APBD Management, and Government Accounting Standards.*

Pembimbing



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP.197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

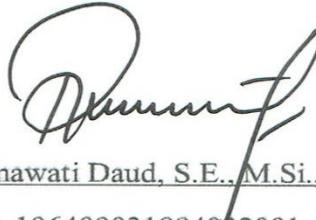
Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam Bahasa Inggris dari mahasiswa:

Nama : A'at Taufik Wahyudi
NIM : 01031482124001
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang.

Telah kami periksa cara penulisan *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk di sampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 13 Januari 2024

Pembimbing



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Haikiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : A'at Taufik Wahyudi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Tembilahan, 20 Juni 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Bayung Lencir, RT 014, RW 001,
Kec.Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin.
Email Address : aataufikwahyudi12@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SDN 003 Griya Mukti Jaya
2012-2015 : SMP Ispat Bayung Lencir
2015-2018 : SMAN 1 Bayung Lencir
2018-2021 : D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi
2021-2023 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), (2015).

Batalyon Resimen Mahasiswa 001 Universitas Jambi, (2019).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMABR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Agensi.....	12
2.2 Konsep, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, (APBD)	13
2.3 Peran yang dimainkan oleh Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, (APBD) ..	14
2.4 <i>Good Governance</i> (Pemerintah yang baik)	14
2.4.1 Akuntabilitas	16
2.4.2 Transparansi	18
2.4.3 Pengawasan.....	19
2.4.4 <i>Value For Money</i>	20
2.5 Standar Akuntansii Pemerintah (SAP) dan Laporan Keuangann Pemerintah Daerah.	21
2.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	24
2.7 Penelitian Terdahulu.....	24
2.8 Kerangka Konseptuall.....	29

2.9.	Perumusan Hipotesis.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.2	Rancangan penelitian.....	34
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Populasi Dan Sampel.....	42
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6	Metode Analisis Data.....	44
3.6.1	Uji Kualitass Dataa.....	44
3.6.2	Uji Asumsii Klasikk.....	46
3.6.3	Uji Hipotesis.....	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Karakteristik Responden.....	50
4.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	52
4.1.3	Uji Kualitas Data.....	54
4.1.4	Uji Asumsi Klasik.....	59
4.1.5	Pengujian Hipotesis.....	66
4.2	Pembahasan Penelitian.....	78
BAB V	PENUTUP.....	88
5.1.	Kesimpulan.....	88
5.2.	Saran.....	90
5.3.	Keterbatasan penelitian.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN.....		95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Manajemn APBD	35
Tabel 3. 2 Akuntabilitas APBD.....	37
Tabel 3. 3 Transparansi APBD	38
Tabel 3. 4 Pengawasan APBD.....	39
Tabel 3. 5 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40
Tabel 4. 1 Karakteristik Data	50
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	51
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	53
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas APBD	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Data Validitas Variabel Transparansi APBD.....	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan APBD	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Setandar Akuntansi Pemerintah	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Manajemen APBD	58
Tabel 4. 9 Hasil uji Reliabilitas variabel.....	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2).....	67
Tabel 4. 14 Hasil Uji T dan Uji Signifikansi	68
Tabel 4. 15 Hasil uji F dan Uji Signifikansi.....	70
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	72
Tabel 4. 17 Hasil Nilai R Square Regresi Linier Berganda	73
Tabel 4. 18 Hasil Uji Regresi Moderasi	74
Tabel 4. 19 Hasil Nilai R Square Moderasi	76

DAFTAR GAMABR

Gambar 2. 1 Diagram hubungan dengan, variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi.....	29
Gambar 4. 1 Grafik Histogram	62
Gambar 4. 2 Grafik P-P Plot	62
Gambar 4. 3 Grafik <i>Scatterplot</i>.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh metodologi organisasi pemerintah yang tidak diawasi dan dikelola sebagaimana mestinya (Ningsih, N. H, 2018). Selanjutnya, muncul isu-isu lain seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit untuk di hilangkan, permasalahan kepolisian yang sulit diselesaikan, sindikasi dalam aktivitas keuangan, dan sifat Pemerintah di daerah yang melemah. Permasalahan ini juga menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia sehingga jumlah pengangguran bertambah, jumlah masyarakat miskin bertambah, tingkat kesejahteraan menurun, bahkan memicu munculnya konflik di berbagai daerah yang dapat melemahkan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Semua keadaan yang ada menunjukkan bahwa praktik dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik terus berlanjut, sehingga dapat menghambat pelaksanaan rencana perubahan (Ningsih, N. H, 2018).

Melaksanakan Pemerintah yang baik (*good governance*) berarti menetapkan dan melaksanakan pendekatan kenegaraan berdasarkan popularitas di masa globalisasi. Kebenaran sistem berbasis suara digambarkan dengan menguatnya komando individu dalam organisasi pemerintah, keterusterangan dalam pengelolaan dana negara, kerja sama dalam penyusunan strategi, sedangkan kebenaran globalisasi digambarkan dengan ketergantungan antar negara, khususnya dalam pengelolaan aset keuangan, dan latihan bisnis.

(Mardiasmo, 2002) Akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegangamanah

(agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini:

- 1) dapat memperkenalkan permasalahan eksekusi secara transparan, cepat dan tegas kepada individu,
- 2) siap menawarkan jenis bantuan yang dapat diterima kepada masyarakat pada umumnya,
- 3) dapat memberikan ruang kepada daerah setempat untuk terlibat dalam pergantian peristiwa dan proses administrasi,
- 4) juga dapat memahami dan mewakili setiap pendekatan publik
- 5) Terdapat metode bagi masyarakat umum untuk mensurvei pelaksanaan pemerintah. Melalui tanggung jawab terbuka, individu dapat mengukur tingkat keberhasilan acara dan kegiatan pemerintah.

(Mardiasmo, 2002), Transparansi menyiratkan salah satu standar administrasi yang baik. Transparansi didasarkan pada peluang untuk memperoleh data. Data yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat diperoleh langsung oleh siapa saja yang memerlukannya. Keterusterangan mengandung arti memberikan masalah keuangan yang terbuka dan dapat diandalkan kepada masyarakat luas dengan pemikiran bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara transparan dan lengkap mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi harta kekayaan yang diterima dengan ditaati peraturan perundang-undangan.

Dari (Mardiasmo, 2001), pengelolaan moneter daerah merupakan tahapan vital yang mencakup seluruh tahapan, baik pada tahap penyusunan maupun tahap perincian APBD. Pengawasan itu wajar di setiap tahap, tidak tepat di tahap evaluasi. Pengawasan moneter teritorial yang dilakukan adalah komponen yang belum bisa dibedakan pada siklus pembuatan rencana belanja sebaba manajemen adalah komponen penting untuk mengarahkan permohonan proyek yang diselesaikan hingga tahap pengungkapan.

Kesesuaian menggunakan standar akuntansi yang berlaku, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi isu, serta komitmen manajemen merupakan beberapa faktor yang bisa menghipnotis akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah mengingat pentingnya akuntabilitas. Kewenangan pada pengambilan keputusan, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Agar masyarakat umum dapat mengakses informasi apapun mengenai kebijakan atau peraturan pemerintah, maka praktik pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi secara terbuka baik dalam hal informasi, penganggaran, maupun komunikasi disebut sebagai transparansi atau keterbukaan. Pengawasan terbuka menyiratkan transparansi dengan Inpres No.7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah contoh bagaimana setiap instansi pemerintah dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan misi organisasi. menjadi tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Berhasil atau tidaknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), harus di laksanakan, dengan pertanggungjawaban berkala berdasarkan pedoman pimpinan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) untuk menyusun laporan AKIP. Alokasi dan distribusi publik yang direncanakan dana untuk setiap kegiatan dan sub kegiatan yang dinyatakan dalam jumlah rupiah tertentu terkait dengan proses penganggaran dalam sektor publik. Prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan harus digunakan untuk memantau dan mengendalikan penganggaran ini (Efrizar, Hardi, & Wiguna, 2017).

Teori keagenan, desentralisasi, dan gagasan transparansi semuanya terkait dengan hubungan antara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, serta sistem pelaporan. Teori keagenan adalah salah satu teori yang mendasari akuntansi dan penganggaran (Halim & Abdullah, 2006). Konsep teori keagenan dapat diterapkan untuk keberlanjutan organisasi publik. Hubungan berdasarkan kesepakatan antara agen dan prinsipal dituangkan dalam teori keagenan. Hubungan ini signifikan karena berfungsi sebagai metode untuk menganalisis komitmen terhadap kebijakan publik. Menurut (Halim & Abdullah, 2006), masyarakat diasumsikan menjadi fokus utama penelitian ini, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai saluran untuk menjalankan amanat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rakyat. Sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999, kinerja di AKIP merupakan ukuran seberapa baik suatu kegiatan atau program memenuhi tujuan dan sasaran organisasi untuk mencapai visi dan misinya.

Pengendalian internal dan eksternal yang baik di perlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, DPRD yang disebut Dewan

dalam dokumen ini semakin berperan penting dalam mengendalikan kebijakan pemerintah. Berikut ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran: 1). Dewan yang membidangi pengawasan anggaran, 2) Audit pengelolaan anggaran dapat diperintahkan oleh dewan kepada auditor eksternal di daerah. Melalui check and balances, diharapkan bahwa pengawasan Dewan terhadap eksekutif akan menghasilkan laporan yang transparan. Pengawasan Dewan memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rakyat secara langsung melakukan kontrol terhadap penguasa (pemerintah) atau lembaga yang memiliki peran pengawasan, seperti parlemen atau media. Mekanisme aturan main yang disepakati juga dibuat agar sistem pengawasan dapat berfungsi. Legislatif pada umumnya menyelenggarakan tiga fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi legislasi (proses pembuatan peraturan perundang-undangan); 2) Fungsi penganggaran (fungsi untuk membuat anggaran) dan fungsi kontrol (tugas untuk mengevaluasi kinerja eksekutif). Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Pengurus yang berkaitan dengan anggaran akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Pertanyaannya adalah apakah fungsi pengawasan disebabkan oleh tambahan pengetahuan. Selain itu, apakah pengawasan anggaran Dewan juga akan dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi kebijakan publik.

Seharusnya seluruh SKPD mempunyai pilihan untuk mengerjakan berbagai hal yang menyebabkan pelaksanaan anggaran belanja para pelaksana tidak didasarkan pada insentif berupa uang. Insentif uang tunai hendaknya diterapkan

dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dalam kaitannya dengan kemandirian provinsi, insentif uang tunai berarti perluasan untuk memimpin legislatif daerah dalam mewujudkan Pemerintah yang baik, khususnya bagian provinsi yang jujur, konservatif, kompeten, dan mampu bertahan, tanggap dan bertanggung jawab. Sebagai pelaksanaan atas pelaksanaan Undang-Undang dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan perda No 7 Tahun 2012 wacana pembentukan, susunan dan Struktur Organisasi pemkot Palembang yang didalamnya mempunyai 10 SKPD, yaitu: Sekretariat daerah, Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, Satuan, Dinas, kantor, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan. dalam hal ini kecamatan serta kelurahan bukan lembaga teknis daerah sehingga tidak dimasukkan pada ruang lingkup penelitian.

Analisis ini di latar belakang *research gap* oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sari, S. M, 2017) memperoleh kesimpulan bahwa dari hasil uji sigmifikasi uji f (*Simultan*) akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif pada pengeolaan APBD, sedangkan pada uji t (*Parsial*) akuntabilitas dan transparansi berpengaruh negatif, tetapi pengawasan berpengaruh positif. Dari hasil analisis regresi moderat, standar akuntansi pemerintah tidak mampu memoderasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD, hal tersebut menunjukan tidak signifikan (*negative*), akan tetapi standar akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang membedakan penelitian ini dari sebelumnya yaitu dari segi objek dan teknik pengambilan sampel yang dimana sebelumnya di lakukan penelitian di daerah

istimewa yogyakarta tentunya sangat berbeda di daerah sumatra seperti di pemerintah kota Palembang, dan penelitian sebelumnya menggunakan Probability cluster sampling digunakan untuk memilih sampel. Ketika homogenitas tidak dapat dicapai, cluster sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian responden sedangkan penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh atau sensus, sampel diambil dengan menggunakan keseluruhan populasi. penelitian ini nantinya bisa menjadi pembaharuan dan pembanding dari penelitian sebelumnya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta menguatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, responsif, dan transparan merupakan fenomena dan aktual yang bisa dilihat, pada manajemen APBD saat ini. Kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah dan berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah akuntabilitas publik. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan dipantau (Mardiasmo, 2006), meskipun informasi yang bebas merupakan dasar dari transparansi.

Masyarakat belum mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemerintah mengenai pengelolaan APBD secara tepat waktu, terbuka, dan akurat, masyarakat belum menerima pelayanan yang berkualitas, dan Masyarakat terpinggirkan dari pembangunan. dan proses Pemerintah terbukti dengan adanya dan fenomena dalam proses pengelolaan APBD, Di kantor wilayah atau unit kerja, baik rencana kerja

maupun rencana anggaran tidak disediakan oleh badan publik secara tertulis. Tahapan pelaksanaan anggaran yang jelek, pemborosan anggaran atau anggaran yang tak efisien, keterlambatan pelaporan keuangan, serta ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, semuanya berkontribusi pada buruknya pelaksanaan anggaran serta pelaporan pelaksanaan anggaran publik. Pemrosesan APBD, akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta standar akuntansi pemerintah semuanya terhubung dengan kenyataan ini. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi seperti judul di bawah ini:

“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD secara Parsial dan simultan?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBD secara parsial dan simultan?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD secara parsial dan simultan?
4. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah mampu meperkuat atau meperlemah afiliasi pada akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan pengelolaan APBD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh akuntabilitast terhadap pengelolaan APBD.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBD.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD.

4. Untuk mengukur dan menganalisis, sebagai variabel moderat, standar akuntansi pemerintah memperkuat atau memperlemah hubungan pada variabel independen dan variabel dependen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teori dapat dijadikan sebagai pedoman, sumber pengetahuan, dan sumber gagasan bagi terciptanya konsep teori keagenan, yang dapat dipraktikkan dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup organisasi publik. Berdasarkan kesepakatan antara agen dan prinsipal yang dituangkan dalam teori keagenan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis di bagi menjadi empat seperti di bawah ini:

- a. Bagi akademisi

penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan pembandingan dalam rangka melakukan penelitian tambahan di bidang ini, maupun oleh pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait dengan isi skripsi ini secara tertulis maupun bacaan. akan berfungsi sebagai titik referensi bagi peneliti

masa depan, terutama mereka yang tertarik dengan sistem akuntansi pemerintah.

b. Bagi penulis

Bermanfaat untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan publik terhadap APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variable Moderasi di Pemerintah kota Palembang. Dengan menggunakan berbagai metode dan alat ukur, agar dapat di tarik suatu kesimpulan hasil dari penelitian. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang di butuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

c. Bagi pemerintah daerah

Sebagai informasi, referensi dan pembandingan, dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi SKPD terkait agar dalam melaporkan dan mengevaluasi tingkat kinerja keuangan lebih terbuka dan tidak ada yang di tutup-tutupi. Terutama terhadap pengelolaan APBD yang akuntabel maupun transparan.

d. Bagi Umum

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber informasi dan referensi bagi masyarakat umum terhadap pengetahuan pengelolaan APBD dan terhadap SKPD terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Efrizar, R., Hardi, & Meilda Wiguna. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1726–1740. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13007>
- Ekarani, D., Pujiningsih, S., & Ahmad, A. (2022). Studi fenomenologi: akuntansi dan perubahan sekolah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 55–64. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p055>
- Fajri, R. N., Djumali, D., & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 16(1), 7–20. <https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2455>
- Friantama, P., & Mukhzarudfa. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprd Kota Jambi). *Ilmu Akuntansi*, 1, 12–19.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square*, Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris (Pp.25-105). Semarang : Badan Penerbit Di Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. & Chariri, A. (2016). *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 25*.
- Ghozali, I., (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*.

Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

- Hikmah, N., Busaini, & Pancawati, S. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, dan Transparansi Publik terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(1), 103–115. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/7187>
- Harvianda, Y. P., Surya, R. A. S., & Azlina, N. (2014). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau ABSTRAKS. 1(2), 1–15
- Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2 No 1 Mei 2006 Hal 53–64.
- INPRES No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (1999). 1.
- Ismiati, & Asyikin, J. (2021). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, Transparansi Dan Peningkata Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(292–106).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2661%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2661/2670>
- Isramirathul Wahyu, Siska Yulia Defitri, & Nidia Anggreni Das. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 222–238. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.506>
- Jauhari, H. Hazizma, S. & Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol8 No. 1, Januari 2021 P-ISSN2339-2436 E-ISSN2549-5968
[Http://Dx.Doi.Org/10.30656/Jak.V8i1.2487](http://Dx.Doi.Org/10.30656/Jak.V8i1.2487)
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No.1, Mei 2006
- Muri Yusuf. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenamedia Group
- Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Penatausahaan Apbd Berkonsep Value for Money Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Di Skpd Kota Palembang. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 171.

<https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1170>

- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota Jambi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>
- Sari, S. M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderat Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 154115377, 1–95.
- Sigurdsson H., H. B. M. S. R. H. y S. J. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995, 662.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6>
- UU Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2004). 1–25.
- Werimon, S. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kota di Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Wiyono, G (2011). Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS17.0 & *SmartPLS2.0*. Yogyakarta: STIM YKPN YOGYAKARTA, Edisi 1.